



ANALISIS KETIMPANGAN REGIONAL ANTAR PROVINSI DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Yetlina Lania¹, Syarwani Canon², Boby Rantow Payu³

Fakultas ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo¹²³

e-mail: yetlinalania02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan regional antarprovinsi di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya selama periode 2022–2023. Ketimpangan regional diukur menggunakan Indeks Williamson, sedangkan variabel independen yang dianalisis meliputi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan rasio kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat dengan nilai Indeks Williamson sebesar 1,46, sementara yang terendah terdapat di Kalimantan Utara dengan nilai indeks sebesar 0,17. Secara empiris, pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional, di mana peningkatan pertumbuhan sebesar 1% diperkirakan meningkatkan Indeks Williamson sebesar 0,034%. Ketersediaan infrastruktur juga menunjukkan pengaruh positif, namun tidak signifikan. Sebaliknya, rasio kapasitas fiskal daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, dengan peningkatan 1% rasio kapasitas fiskal diperkirakan mampu menurunkan ketimpangan sebesar 0,032%. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi dan fiskal antarwilayah untuk mengurangi disparitas regional di Indonesia.

Kata Kunci: *Indeks Williamson, Kapasitas Fiskal daerah, infrastruktur, Pertumbuhan ekonomi.*

ABSTRACT

This study aims to analyze interregional disparities across provinces in Indonesia and identify the factors influencing such disparities during the 2022–2023 period. Regional inequality is measured using the Williamson Index, while the independent variables include economic growth, infrastructure availability, and the regional fiscal capacity ratio. The study employs a quantitative approach using panel data regression analysis across 34 provinces. The results show that the highest level of regional disparity occurred in West Papua Province, with a Williamson Index of 1.46, while the lowest was in North Kalimantan, with an index of 0.17. Empirical findings indicate that economic growth has a positive and statistically significant effect on regional inequality, where a 1% increase in growth is estimated to raise the Williamson Index by 0.034%. Infrastructure availability also shows a positive effect, although not statistically significant. Conversely, the regional fiscal capacity ratio has a significant negative effect, suggesting that a 1% increase in this ratio can reduce regional disparities by approximately 0.032%. These findings highlight the need for more equitable economic and fiscal development policies to reduce interregional inequality in Indonesia.

Keywords: *economic growth, infrastructure, regional fiscal capacity and Williamson Index*

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan (income inequality) merupakan isu struktural yang masih mengemuka dalam proses revitalisasi ekonomi di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Ketimpangan ini mencerminkan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata di antara lapisan masyarakat, serta menjadi indikator langsung dari kegagalan sistem distribusi pendapatan nasional. Ketika koefisien ketimpangan meningkat, hal ini mencerminkan

memburuknya keseimbangan dalam alokasi pendapatan masyarakat (Khoirudin & Dahlan, 2020). Sebagai salah satu negara emerging, Indonesia menghadapi tantangan serupa. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tergolong tinggi (Ariesta et al., 2022; Febriyani & Anis, 2021), meskipun pemerintah telah berupaya menanganinya melalui berbagai kebijakan fiskal dan pembangunan. Namun demikian, ketimpangan tersebut masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun (Yuliani et al., 2024), yang tergambar dalam data Gini Rasio Indonesia pada Gambar 1.



Gambar 1. Gini Rasio Indonesia 2019-2023

Sumber "BPS Indonesia Tahun 2024"

Tantangan ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakteristik geografis dan struktural negara ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang besar, tetapi juga menghadapi persoalan serius dalam konektivitas antarwilayah. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur, pelayanan publik, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antarwilayah (Farhan & Sugianto, 2020). Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh disparitas pembangunan regional, di mana pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah yang memiliki infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik (Suparman & Muzakir, 2023).

Lebih jauh, perbedaan daya saing antarwilayah juga menjadi faktor yang memperbesar kesenjangan. Ketimpangan dalam indeks daya saing regional, yang mencakup infrastruktur, kualitas layanan publik, dan iklim investasi, dapat mempercepat ketimpangan pendapatan antarwilayah. Indonesia masih menghadapi kendala besar dalam aspek daya saing global, khususnya terkait infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, dan konektivitas digital yang belum merata (Widodo et al., 2022). Selain itu, disparitas kapasitas fiskal antarwilayah juga berperan penting dalam memperlebar jurang ketimpangan. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi lebih mampu melakukan revitalisasi infrastruktur, menyediakan layanan publik yang memadai, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah mengalami keterbatasan yang berdampak pada lambatnya pembangunan dan minimnya akses terhadap peluang ekonomi (Syaifullah, 2021; Syukri et al., 2025). UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi kerangka regulatif dalam mengatasi ketimpangan fiskal ini, namun implementasinya masih menghadapi tantangan.

Sejauh ini, berbagai studi telah menyoroti faktor-faktor penyebab ketimpangan seperti konsentrasi ekonomi, disparitas infrastruktur, dan kapasitas fiskal daerah. Namun, masih sedikit



penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara simultan dalam satu kerangka analisis untuk mengukur kontribusi masing-masing terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat regional. Selain itu, pendekatan kuantitatif yang menguji pengaruh ekspos sektoral, pertumbuhan ekonomi, serta kapasitas fiskal secara bersama-sama terhadap ketimpangan regional juga masih terbatas dalam konteks Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, daya saing wilayah, dan kapasitas fiskal terhadap tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia. Dengan memadukan perspektif ekonomi regional dan analisis data panel, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metodologi deskriptif kuantitatif serta menerapkan metode dokumentasi sebagai pendekatan pengumpulan data. Data yang digunakan didapatkan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis regresi data panel, yakni metode yang menggabungkan data *cross-section* dan data *time series*. Sementara itu, pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan dijalankan dengan mengaplikasikan metode Indeks Williamson. Nilai indeks ini menunjukkan seberapa jauh distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai Indeks Williamson, maka ketimpangan pada wilayah tersebut semakin tinggi. Berikut rumus dari indeks Williamson

$$IW = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f_i}{\bar{Y}} / n}$$

Deskripsi :

- IW : Indeks Williamson
- Y_i : PDRB Per kapita tiap Kabupaten/Kota
- Y : PDRB Per kapita Provinsi
- F_i : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota
- N : Jumlah penduduk tiap provinsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antar provinsi di Indonesia termasuk faktor-faktor yang berkontribusi pada tahun 2022-2023. Studi ini menggunakan data sekunder dalam format data cross section dan time series dari 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2022 dan 2023

Hasil

Ketimpangan regional adalah fenomena yang dialami akibat adanya variasi dalam sumber daya dan faktor produksi yang dapat diakses oleh masing-masing wilayah. Hal ini menyebabkan distribusi pendapatan atau kemakmuran yang tidak merata di antara wilayah-wilayah dalam suatu negara atau provinsi. Tingkat disparitas regional diklasifikasikan dalam tiga kelompok utama: Rendah (0-0.29): Menggambarkan kondisi distribusi ekonomi yang cukup merata dengan kesenjangan minimal antarwilayah. Sedang (0.3-0.49): Menunjukkan awal munculnya ketidakseimbangan pembangunan yang memerlukan intervensi kebijakan. Tinggi (0.5-1.0): Mencerminkan polarisasi ekonomi yang parah antar daerah

Tabel 1 Hasil Indeks Williamson

PROVINSI	2022	2023	PROVINSI	2022	2023
Aceh	0.42	0.43	Kep. Riau	0.39	0.37
Bali	0.43	0.44	Lampung	0.28	0.30
Banten	0.63	0.63	Maluku	0.43	0.42
Bengkulu	0.45	0.45	Maluku Utara	0.81	0.95
Di Yogyakarta	0.48	0.48	Nusa Tenggara Barat	0.79	0.73
Dki Jakarta	0.49	0.50	Nusa Tenggara Timur	0.65	0.66
Gorontalo	0.19	0.21	Papua	0.53	0.44
Jambi	0.43	0.43	Papua Barat	1.34	1.57
Jawa Barat	0.74	0.74	Riau	0.26	0.25
Jawa Tengah	0.65	0.65	Sulawesi Barat	0.33	0.34
Jawa Timur	0.99	0.99	Sulawesi Selatan	0.76	0.76
Kalimantan Barat	0.28	0.27	Sulawesi Tengah	1.38	1.47
Kalimantan Selatan	0.44	0.44	Sulawesi Tenggara	0.49	0.49
Kalimantan Tengah	0.22	0.21	Sulawesi Utara	0.51	0.49
Kalimantan Timur	0.46	0.46	Sumatera Barat	0.30	0.30
Kalimantan Utara	0.17	0.17	Sumatera Selatan	0.73	0.78
Kep. Bangka Belitung	0.18	0.17	Sumatera Utara	0.57	0.59

Pemilihan Model Analisis

Uji Chow

Tabel 2. Uji Chow

Cross-section F	123.771328	(33,31)	0.0000
Cross-section Chi-square	332.419169	33	0.0000

Berdasarkan Uji Chow pada tabel 2 dapat probabilitas untuk F-statistik tercatat adalah 0.0000, yang mana jauh lebih kecil dikontraskan dengan tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed effect Model*.

Uji Hausman

Tabel 3. Uji Hausman

Cross-section random	6.827383	3	0.0776
----------------------	----------	---	--------

Berdasarkan Uji Chow pada tabel 2 dapat probabilitas untuk F-statistik tercatat adalah 0.0776, yang mana jauh lebih besar dikontraskan dengan tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukan bahwa model yang terpilih adalah *Random Effect Model*

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Uji Lagrange Multiplier

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breus-Pagan	28.56501	0.827784	29.39280
	(0.0000)	(0.3629)	(0.0000)
Honda	5.344625	-0.909826	3.135876
	(0.0000)	(0.8185)	(0.0009)
King-Wu	5.344625	-0.909826	0.020249
	(0.0000)	(0.8185)	(0.4919)
Standardized Honda	5.588617	-0.577866	-1.426240
	(0.0000)	(0.7183)	(0.9245)
Standardized King-Wu	5.588617	-0.577866	-2.041085
	(0.0000)	(0.7183)	(0.9794)
GHM		--	28.56501

	--	--	(0.0003)
--	----	----	----------

Berdasarkan Uji Chow pada tabel 2 dapat probabilitas untuk F-statistik tercatat adalah 0.0000, yang mana jauh lebih kecil dikontraskan dengan tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah *Random Effect Model*

Hasil Estimasi Regresi *Random Effect Model*

Tabel 5 Hasil Estimasi Regresi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.552085	0.069171	7.981439	0.0000
PERTUMBUHAN EKONOMI	0.012185	0.005269	2.322443	0.0240
IDSD INFRA	0.005830	0.016522	0.352851	0.7254
RASIO KFD	-0.032397	0.012131	-2.670561	0.0096

$$IW = 0.552085 + 0.012185 PEit + 0.005830 IDSD Ifrait + -0.032397 Rasio_KFDit$$

Berdasarkan formula diatas, maka kontribusi dari tiap-tiap variabel independent pada variabel dependen diinterpretasikan sebagai berikut; 1) Konstanta, Hasil estimasi menunjukkan nilai konstanta sebesar 0.552085. Ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya kontribusi dari pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan rasio kapasitas fiskal daerah, tingkat ketimpangan regional antarprovinsi di Indonesia periode 2022-2023 adalah 0.552085. 2) Pertumbuhan Ekonomi, Analisis mengungkapkan bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi dengan asumsi variabel lain konstan, berdampak pada peningkatan ketimpangan regional sebesar 0.012185%. Temuan ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan mengurangi kesenjangan antardaerah, melainkan justru berpotensi memperlebar ketimpangan jika tidak diiringi kebijakan pemerataan. 3) Variabel infrastruktur menunjukkan koefisien positif sebesar 0,005830. Hal ini menyiratkan bahwa pembangunan infrastruktur dalam kondisi tertentu justru dapat meningkatkan ketimpangan regional sebesar 0,005830% untuk setiap unit peningkatan infrastruktur. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang belum proporsional atau terkonsentrasi di wilayah tertentu. 4) Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, Hasil yang paling signifikan muncul dari variabel kapasitas fiskal daerah, di mana setiap kenaikan 1% rasio kapasitas fiskal daerah berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan sebesar -0.032397%. Angka ini mengisyaratkan bahwa disparitas kemampuan fiskal antar daerah justru memperbaiki ketimpangan.

Uji Hipotesis Statistik

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.135913
Adjusted R-squared	0.095409

Sumber: Output Eviews 10, Data diolah 2025

Berdasarkan hasil estimasi Random Effects Model (REM) yang tertuang dalam output regresi, didapatkan value Adjusted R-squared sebesar 0.095. Nilai ini mengindikasikan variabel-variabel independen yang meliputi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan rasio kapasitas fiskal daerah secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi ketimpangan regional (IW) sebesar 9.5%. Dengan kata lain, kombinasi ketiga variabel eksogen tersebut memberikan kontribusi signifikan namun terbatas dalam menerangkan dinamika ketimpangan antar



Uji Signifikan Simultan

Hasil Uji F

F-statistic	3.355542
Prob(F-statistic)	0.024188

Sumber: Output Eviews 10, Data diolah 2025

Dalam hasil analisis yang diperoleh, nilai Prob F sebesar 0,002 menggambarkan angka yang secara nyata lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa secara komprehensif variabel-variabel independen dalam model ini memberikan pengaruh yang signifikan.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Hasil Uji Signifikan Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.552085	0.069171	7.981439	0.0000
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.012185	0.005269	2.312443	0.0240
IDSD_INFRA	0.005830	0.016522	0.352851	0.7254
RASIO_KFD	-0.032397	0.012131	-2.670561	0.0096

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Berdasarkan output regresi, variable pertumbuhan ekonomi, Indeks daya saing daerah infrastruktur dan rasio kapasitas fiskal daerah berdasarkan hasil uji signifikan adalah sebagai berikut: 1) Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan regional. 2) Variabel infrastruktur dengan t-statistic Prob sebesar $0,72 > 0,05$, artinya variabel infrastruktur tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap ketimpangan regional. 3) Variabel rasio kapasitas fiskal daerah dengan nilai $0,00 > 0,05$, menunjukkan bahwa variabel rasio kapasitas fiskal daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan regional

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan temuan analisis empiris, teridentifikasi bahwa variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi positif dan signifikan dengan ketimpangan regional di Indonesia. Secara spesifik, koefisien regresi sebesar 0.012185 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan memperbesar ketimpangan antardaerah sebesar 0.012185 persen, dengan anggapan variabel infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah tidak berubah konstan (ceteris paribus). Signifikansi statistik dari hubungan ini diperkuat oleh nilai prob-t-statistic sejumlah 0.0240 yang terletak di bawah tingkat signifikansi 0,05.

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan antar daerah karena lebih banyak terjadi pertumbuhan ekonomi di sektor tersier, yang meliputi layanan seperti perdagangan, perbankan, pariwisata, dan teknologi informasi, yang biasanya terkonsentrasi di kota-kota besar (Hermawan & Lestari, 2022; Setiawan & Lestari, 2022). Kota-kota ini sering menjadi pusat aktivitas ekonomi, menarik investasi dan tenaga kerja yang terampil (Pravitasari et al., 2025). Sementara itu, daerah pedesaan atau yang kurang berkembang sering kali tidak



memiliki infrastruktur atau sumber daya yang cukup untuk mengembangkan sektor tersier, sehingga mereka tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Indeks Daya Saing Daerah Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil analisis estimasi, ditemukan bahwa variabel infrastruktur menunjukkan pengaruh positif terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Koefisien regresi sebesar 0.005830 menunjukkan bahwa apabila indeks infrastruktur bertambah sebesar 1 persen, maka ketimpangan antarwilayah diperkirakan akan naik sebesar 0.005830 persen, mengasumsikan bahwa variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah berada dalam kondisi tetap (*ceteris paribus*). Meskipun demikian, nilai probabilitas *t-statistik* sebesar 0.7254 yang lebih besar dari signifikansi 0,05 mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

Pembangunan infrastruktur sering kali terpusat di lokasi-lokasi tertentu, terutama di kota-kota besar dan pusat-pusat ekonomi (Anggriani & Widajanti, 2023; Bappenas, 2017). Hal ini menyebabkan daerah lain, terutama yang terpencil atau kurang berkembang, mengalami kesulitan dalam hal akses dan layanan (Sukmayadi & Yahya, 2020). Wilayah dengan infrastruktur yang baik cenderung lebih maju dan menarik lebih banyak investasi, sedangkan daerah yang kurang berkembang tetap tertinggal.

Pengaruh Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Terhadap Ketimpangan Regional

Analisis empiris dalam studi ini mengungkapkan temuan yang bertolak belakang dengan hipotesis awal mengenai pengaruh Rasio Kapasitas Fiskal Daerah terhadap ketimpangan regional. Hasil regresi menunjukkan hubungan negatif yang signifikan secara statistik (koefisien -0.032397; *p-value* 0.0096), di mana setiap peningkatan 1% kapasitas fiskal daerah justru berkontribusi pada penurunan ketimpangan regional sebesar -0.032397 persen pada Indeks Williamson.

Meningkatnya kapasitas fiskal daerah secara inheren mendorong penurunan ketimpangan karena memberikan otoritas lokal kekuatan finansial yang lebih besar untuk menjalankan perannya dalam redistribusi ekonomi (Kementerian Keuangan RI, 2022; Nirola et al., 2017). Dengan anggaran yang lebih substansial, pemerintah daerah mampu mendistribusikan dana secara strategis bagi pengembangan infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, 2024). Manfaat dari investasi ini cenderung lebih dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya mungkin kurang memiliki akses, dibandingkan dengan kelompok kaya yang sudah memiliki opsi layanan privat (Brodjonegoro, 2016).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat merupakan wilayah dengan tingkat ketimpangan regional tertinggi di Indonesia, sebagaimana tercermin dari nilai rata-rata Indeks Williamson sebesar 1,46. Sebaliknya, Kalimantan Utara memiliki tingkat ketimpangan terendah dengan rata-rata indeks sebesar 0,17. Secara ekonometrik, pertumbuhan ekonomi terbukti memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan regional, di mana setiap peningkatan sebesar 1 persen dalam pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menaikkan Indeks Williamson sebesar 0,012185 persen. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga memberikan kontribusi positif terhadap ketimpangan antarwilayah, di mana peningkatan nilai infrastruktur sebesar 1 persen berpotensi meningkatkan Indeks Williamson sebesar 0,005830 persen. Faktor lain yang memengaruhi adalah rasio kapasitas fiskal daerah, yang secara statistik menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan, di mana peningkatan rasio kapasitas fiskal sebesar 1 persen diperkirakan akan menurunkan Indeks Williamson sebesar 0,032397 persen. Temuan



ini menegaskan pentingnya pemerataan infrastruktur dan penguatan kapasitas fiskal daerah untuk mengurangi disparitas regional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, N., & Widajanti, A. (2023). Ketimpangan antar wilayah & hubungannya dengan belanja pemerintah: Studi di Indonesia. *Jurnal Budget*, 8(2), 89-100.
- Ariesta, L. C. O. W., Sodik, J., & Nuryadin, D. (2022). Determinan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota dan keterkaitan spasial. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 737–754. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.79>
- Bappenas. (2017). *Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia: Fakta dan strategi inisiatif*. IPB Repository (Orasi Ilmiah Prof. Firdaus).
- Brodjonegoro, B. P. S. (2016). *Indonesia's 6 years of decentralization*. World Bank Document.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI. (2024). *Sinergi kebijakan fiskal dalam memperkuat strategi penurunan kemiskinan*. Laporan Perkembangan Ekonomi Fiskal Daerah (LPEFD).
- Farhan, M., & Sugianto. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258.
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3, 375–375. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95714-2_300111
- Hermawan, S., & Lestari, Y. (2022). Perkembangan ekonomi wilayah dan peran sektor tersier di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 1-14.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Khoirudin, R., & Dahlan, U. A. (2020). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 15(1), 17–30.
- Nirola, N., Sahu, S., & Choudhury, A. (2017). *Fiscal decentralization and regional disparity: Evidence from cross-section and panel data*. SSRN Electronic Journal.
- Pravitasari, H., Purbowo, B., & Setiawan, R. (2025). *Digital transformation and regional development disparities in Indonesia*. Loupias Conference.
- Setiawan, B., & Lestari, E. (2022). Analisis pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *E-Jurnal LPPM Universitas Samawa*, 10(1), 1-10.
- Sukmayadi, V., & Yahya, M. (2020). Disparities in educational quality between urban and rural regions in Indonesia: Unequal resource distribution as a key barrier. *Journal of Educational Policy Analysis and Strategic Research*, 12(4), 1-15.
- Suparman, S., & Muzakir, M. (2023). Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2251803>
- Syaifullah. (2021). Analisis kapasitas fiskal Kabupaten Langkat. *Jurnal Bonanza*, 1(2), 24–29.
- Syukri, U., Sofiaturrohmah, S., & Kasman, A. (2025). Efisiensi fiskal dan dampaknya terhadap transfer dana daerah: Analisis kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025. 7(1).
- Widodo, P., Ariani, N., & Supriadi, Y. N. (2022). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di kota dan kabupaten Pulau Jawa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01), 1–11.

